

JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) Vol.3, No.6 Juni 2025

e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX

PT. Media Akademik Publisher

AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS BEM KM UTM DALAM AKSI SOLIDARITAS *JUSTICE FOR EEN JUMIANTI*

Oleh:

Francisco Dias Arya Purnama¹
Muhammad Nasiruddin Alfanani²
Ismed Ali Ridho Fatahillah³
Muhammad Ragil Alif Azhar⁴
Muhammad Labibun Asyfani⁵

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: franciscoarya33@gmail.com, alvakhece2019@gmail.com, fismedaliridho@gmail.com, muhammadragilalifazhar@gmail.com, M.l.asifanny@gmail.com.

Abstract. This study aims to analyze the crisis communication management strategies carried out by the Student Executive Board (BEM KM) of Universitas Trunojoyo Madura (UTM), under the Adbhinara Cabinet, in the solidarity movement Justice for Een Jumianti. The case involved the murder of a UTM female student, which sparked a large-scale response from the academic community, particularly student organizations. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through indepth interviews, observations, and documentation from social media and official BEM publications. The study is grounded in the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) developed by Coombs, focusing on three phases of crisis: pre-crisis, crisis response, and post-crisis. The findings indicate that BEM KM UTM responded quickly by forming a legal advocacy team, formulating a legal basis for public demands under Article 340 of the Indonesian Criminal Code, and disseminating public messages through social media and organized demonstrations. During the crisis, the organization maintained open and consistent communication via digital campaigns, official

statements, and direct engagement with university leadership and law enforcement. After the verdict was delivered, BEM continued with post-crisis activities including internal evaluation and the institutional documentation of advocacy processes as a model for future campus responses. This study reveals that student organizational communication can play a critical role in managing social crises and serve as a powerful tool for pursuing justice. Strategic communication that is timely, empathetic, and legally grounded proved effective in building public solidarity and influencing institutional legal responses.

Keywords: Crisis Communication, Student Organization Management, Legal Advocacy, Justice For Een, BEM KM UTM.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen komunikasi krisis yang dijalankan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Kabinet Adbhinara dalam aksi solidaritas Justice for Een Jumianti. Kasus ini merupakan tragedi pembunuhan salah satu mahasiswi UTM yang memicu respons sosial masif dari civitas akademika, terutama organisasi mahasiswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi media sosial dan publikasi resmi BEM. Penelitian ini menggunakan teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh Coombs untuk menganalisis tiga tahap krisis: pra-krisis, saat krisis, dan pasca-krisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BEM KM UTM merespons krisis secara cepat dengan membentuk tim advokasi hukum, menyusun dasar hukum tuntutan berdasarkan Pasal 340 KUHP, serta menyebarluaskan pesan publik melalui media sosial dan aksi lapangan. Pada tahap krisis, organisasi menjalankan komunikasi terbuka dan konsisten melalui kampanye digital, pernyataan sikap, dan audiensi resmi dengan pihak kampus dan aparat hukum. Setelah vonis dijatuhkan, BEM melanjutkan tahapan pasca-krisis dengan evaluasi internal dan dokumentasi kelembagaan sebagai model advokasi kampus ke depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi mahasiswa dapat memainkan peran krusial dalam pengelolaan krisis sosial dan menjadi alat perjuangan keadilan yang efektif. Strategi komunikasi yang cepat, empatik, dan berbasis hukum terbukti mampu membangun solidaritas publik dan mendorong respons aparat terhadap kasus hukum.

Kata Kunci: Komunikasi Krisis, Manajemen Organisasi Mahasiswa, Advokasi Hukum, Justice For Een, BEM KM UTM.

LATAR BELAKANG

Kompleksitas isu global saat ini membutuhkan kerja sama yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama, yang menjadikan organisasi sangat penting. Organisasi kini mampu menggabungkan berbagai sumber daya, ide, dan pengalaman untuk menghadapi perubahan cepat yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan pergeseran ekonomi. Sekelompok orang akan terus melakukan adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam organisasi (Fithriyyah, 2021). Menjaga arus informasi, menjamin sinergi, dan menghindari informasi palsu yang dapat menghambat pencapaian tujuan dalam situasi ini semuanya bergantung pada komunikasi yang efektif. Menurut Zamzami & Sahana, (2021) organisasi dapat berfungsi secara efektif dan adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan yang semakin kompleks dengan memfasilitasi kolaborasi lintas tim, pengambilan keputusan, dan penyelesaian sengketa melalui komunikasi yang efektif.

Komunikasi memiliki peran yang sentral dalam membangun kesadaran publik, terutama saat menghadapi isu yang menyentuh nilai moral dan keadilan seperti kasus kekerasan dan pembunuhan. Dalam konteks perguruan tinggi, organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan aspirasi, tetapi juga aktor sosial yang mampu memobilisasi opini publik dan mendorong perubahan nyata. BEM KM UTM mengambil posisi sebagai aktor utama dalam mengawal proses hukum, membangun narasi keadilan, dan menjaga tekanan moral terhadap aparat penegak hukum dalam kasus pembunuhan Een Jumianti yakni seorang mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang terjadi pada akhir tahun 2024.

Kasus *Justice for Een Jumianti* bukan hanya menjadi tragedi personal, tetapi juga mencerminkan kegentingan sosial yang menggugah empati dan kemarahan publik, khususnya di kalangan civitas akademika UTM. Korban dibunuh secara brutal dan dibakar oleh pacarnya sendiri dengan inisial (MMA), yang juga merupakan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi STIT Al Ibrohimy. Peristiwa ini kemudian menjadi titik tolak munculnya aksi solidaritas besar-besaran dari mahasiswa, yang dimotori langsung oleh BEM KM UTM. Proses pendampingan dan komunikasi advokatif dilakukan secara

konsisten dari awal Desember 2024 hingga pertengahan Mei 2025. Dalam kurun waktu lebih dari enam bulan tersebut, BEM KM UTM tidak hanya melakukan mobilisasi massa melalui aksi demonstrasi, tetapi juga memproduksi dan menyebarkan pesan-pesan komunikasi melalui media sosial, surat terbuka, audiensi, hingga penggalangan dukungan dari pihak eksternal kampus. Perjuangan panjang tersebut membuahkan hasil, ketika pada akhirnya terdakwa dijatuhi vonis hukuman mati berdasarkan pasal 340 KUHP.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan di tingkat perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengelolaan komunikasi, terutama ketika menghadapi isu sosial atau konflik internal. Penelitian oleh Karyanti dkk., (2024), mengenai komunikasi organisasi dalam manajemen konflik di BEM Sekolah Vokasi IPB University mengungkapkan bahwa komunikasi terbuka secara formal maupun informal berperan besar dalam menyelesaikan dinamika internal yang kompleks. Keterbukaan komunikasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas koordinasi internal, tetapi juga memperkuat citra BEM sebagai organisasi yang responsif terhadap berbagai persoalan.

Senada dengan hal tersebut, Rosanti & Satiningsih, (2022), dalam penelitiannya menemukan bahwa komunikasi organisasi yang efektif dan persepsi dukungan terhadap anggota berkontribusi secara signifikan terhadap komitmen organisasi mahasiswa. Penelitian ini memperlihatkan bahwa semakin baik pengelolaan komunikasi dalam organisasi mahasiswa, maka semakin tinggi loyalitas dan keterlibatan anggotanya dalam menjalankan agenda organisasi. Temuan ini mendukung konteks BEM KM UTM yang mampu menjaga konsistensi pengawalan kasus *Justice for Een Jumianti* selama berbulanbulan, yang tentunya memerlukan komitmen kolektif dan komunikasi yang kuat.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi organisasi dalam tubuh BEM tidak hanya berfungsi untuk mengatur alur kerja internal, tetapi juga memiliki dimensi strategis yang dapat memengaruhi persepsi eksternal dan arah kebijakan. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana manajemen komunikasi krisis dijalankan oleh BEM KM UTM secara strategis. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya menyangkut pengelolaan informasi, tetapi juga bagaimana pesan disusun, disebarluaskan, serta mampu membangun solidaritas kolektif dan pengaruh terhadap jalannya proses hukum. Studi ini menjadi penting untuk memahami bagaimana aktor non-negara seperti BEM

dapat menjadi kekuatan sipil yang efektif dalam isu hukum dan keadilan melalui pendekatan komunikasi yang terencana.

KAJIAN TEORITIS

Teori Manajemen Krisis

Manajemen krisis merupakan proses strategis yang dilakukan organisasi untuk mempersiapkan, merespons, dan memulihkan diri dari situasi yang mengancam reputasi, stabilitas, atau keberlangsungan organisasi. Menurut Coombs (2012), komunikasi krisis mencakup identifikasi potensi krisis, perencanaan respons, dan pelaksanaan strategi komunikasi yang tepat agar publik tetap memperoleh kepercayaan dan kejelasan informasi melalui pendekatan *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT). Teori ini memberikan kerangka konseptual yang jelas tentang bagaimana organisasi seharusnya bertindak dalam tiga fase krisis: pra-krisis, saat krisis, dan pasca-krisis (Coombs, 2015).

1. Pra-Krisis (*Pre-Crisis Stage*)

Tahap ini menekankan pada identifikasi potensi risiko, persiapan skenario darurat, dan pembentukan tim krisis. Menurut Coombs (2015), organisasi harus mengembangkan *crisis communication plan*, menunjuk juru bicara, dan melakukan pelatihan simulasi untuk memastikan kesiapan respons. Selain itu, pada tahap ini penting dilakukan pemantauan terhadap gejala-gejala krisis melalui media, publik, maupun data internal.

2. Saat Krisis (*Crisis Response Stage*)

Tahap ini adalah fase utama ketika krisis terjadi dan organisasi harus memberikan respons cepat, akurat, dan konsisten untuk mengendalikan situasi serta mengurangi dampak negatif terhadap reputasi. Coombs (2012) menyatakan bahwa kecepatan dan kejelasan informasi menjadi kunci, dan organisasi harus menyampaikan pernyataan resmi melalui saluran komunikasi yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi yang digunakan pada tahap ini meliputi transparansi, empati, dan tanggung jawab terhadap publik terdampak.

3. Pasca-Krisis (*Post-Crisis Stage*)

Setelah situasi krisis mereda, organisasi memasuki tahap evaluasi. Coombs (2015) menjelaskan bahwa pada tahap ini dilakukan refleksi terhadap tindakan selama krisis, pemulihan reputasi institusi, dan pembaruan protokol penanganan krisis. Organisasi

juga diharapkan tetap melakukan komunikasi lanjutan dengan publik untuk mengembalikan kepercayaan dan memperkuat legitimasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi komunikasi dan dinamika organisasi yang dilakukan oleh BEM KM Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dalam mengawal kasus *Justice for Een Jumianti*. Menurut Moleong dalam (Kusumastuti & Khoiron, 2019), metode kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dengan menekankan pada makna, konteks, serta interaksi yang terjadi secara alamiah.

Fokus penelitian ini adalah strategi komunikasi organisasi BEM KM UTM dalam mengawal kasus *Justice for Een Jumianti* dalam tiga tahapan manajemen krisis: prakrisis, saat krisis, dan pasca-krisis, sebagaimana dikaji melalui teori *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) (Coombs, 2015). Subjek penelitian meliputi pengurus BEM KM UTM yang terlibat aktif dalam pengawalan kasus *Justice for Een Jumianti*. Data yang dikumpulkan mencakup data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder dari studi literatur. Instrumen penelitian meliputi daftar pertanyaan dan perekam suara untuk mendukung keakuratan informasi yang diperoleh.

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan menyusun informasi berupa alur strategi manajemen komunikasi krisis yang dijalankan oleh BEM KM Kabinet Adbhinara UTM dalam mengawal kasus *Justice for Een Jumianti* dan tantangan komunikasi yang dihadapi selama proses pengawalan kasus berlangsung. Data yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka akan dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data untuk menyederhanakan informasi, penyajian data untuk memudahkan pemahaman, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk memperoleh hasil yang kredibel dan valid (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa strategi komunikasi BEM KM UTM dalam aksi solidaritas *Justice for Een Jumianti* mencerminkan pola manajemen komunikasi krisis

yang sistematis dan berkelanjutan. Analisis dilakukan berdasarkan tiga tahapan utama dalam teori manajemen krisis: pra-krisis, saat krisis, dan pasca-krisis (Coombs, 2012, 2015).

1. Tahap Pra-Krisis: Kesadaran dan Perencanaan Awal

Pada tahap pra-krisis, BEM KM UTM merespons secara cepat setelah informasi mengenai kematian Een Jumianti tersebar ke publik. Melalui forum internal, organisasi segera mengidentifikasi kasus ini sebagai isu moral dan keadilan yang berpotensi menjadi krisis sosial di lingkungan kampus.

"Sejak pertama kali berita ini beredar, ditemukan mayat Een Jumianti seorang mahasiswi UTM yang dibakar oleh kekasihnya menyebar luas. Saya langsung menyadari bahwa ini bukan sekadar tragedi indvidu, tapi krisis moral dan budaya kampus yang menuntut respon BEM. Berita dari berbagai media, termasuk pengakuan dari Polres Bangkalan tentang motif pembunuhan akibat penolakan aborsi, memperjelas bahwa situasinya sangat serius dan memerlukan aksi nyata oleh BEM KM UTM."

(Wawancara dengan Wapresma UTM, 18 Juni 2025)

"Pertimbangan awal dari BEM KM UTM ini untuk menjadi awal dari gerakan dan pernyataan resmi karena almh. Een Jumianti ini adalah salah satu mahasiswa UTM, tentunya kita selaku badan eksekutif harus memperjuangkan hak-hak dan keadilan apalagi terjadi di bumi Madura ini. Dan juga almarhumah Ini bukan berasal dari orang madura, tentunya untuk memperjuangkan keadilan ini kalau tidak dibantu oleh kita semua, lantas siapa lagi."

(Wawancara dengan Presma UTM, 18 Juni 2025)

BEM kemudian membentuk satuan tugas komunikasi dan advokasi untuk mengatur arah gerakan serta menyusun rencana jangka pendek dan panjang. Salah satu langkah penting adalah mengkaji bersama dan pembentukan struktur koordinasi dengan departemen lain seperti Kastrat, Advokasi, dan Aksi Massa. Dalam fase ini, komunikasi internal menjadi prioritas agar gerakan berjalan selaras dan solid.

"Yang pertama kita mengkaji bersama dengan seluruh bagian dibawah naungan Menkopolhukam, yang didalamnya terdapat bagian Analisis Strategi Isu Aksi Politik dan Propaganda (ASIAP) serta bagian Kementerian Hukum dan HAM, untuk membahas bagaimana keberlanjutan dari tindakan kriminalitas ataupun

pembunuhan ini. Jadi kami mengumpulkan dari internal BEM terlebih dahulu, setelah itu bergerak membuat kajian bersama seluruh Kastrat di setiap fakultas sehingga itu rampung dan alhamdulillah temen-temen dari fakultas banyak yang mendukung."

(Wawancara dengan Presma UTM, 18 Juni 2025)

Kementerian Hukum dan HAM BEM juga mulai melakukan analisis hukum terhadap kasus dan menyusun rujukan pasal yang akan dibawa dalam tuntutan publik. Persiapan ini dilakukan secara cepat namun strategis dalam waktu kurang dari satu minggu sejak kasus mencuat.

"Iya, jadi waktu kabar tentang meninggalnya almarhumah Een mulai menyebar dan fakta-fakta awalnya keluar, kami di Kemenkumham langsung sadar bahwa ini bukan kasus biasa. Ada temuan unsur kekerasan dan bahkan pembunuhan berencana yang sangat kejam. Saat itu, kami nggak bisa nunggu lama karena selain publik menunggu respons, kami juga punya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa tuntutan mahasiswa punya dasar hukum yang kuat. Hari-hari pertama itu sangat intens. Kami langsung rapat internal, buka-buka KUHP, mencari pasal-pasal yang relevan, dan konsultasi bersama Satgas PPKPT UTM dan dosen yang berlatar belakang hukum. Kami fokus ke Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, karena dari informasi awal, pelaku sudah menyiapkan segala sesuatunya dan melakukan tindakan dengan sadar. Nggak cuma itu, kami juga mulai merancang narasi hukum yang bisa dipahami oleh mahasiswa umum. Karena kan nggak semua orang paham bahasa hukum. Jadi kami sederhanakan: bahwa ini adalah kejahatan yang harus diadili seadiladilnya, dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Kami bungkus itu dalam siaran pers, poster aksi, dan naskah tuntutan yang kemudian diserahkan ke pihak kampus dan aparat."

(Wawancara dengan Kemenkumham Bem, 18 Juni 2025)

2. Tahap Saat Krisis: Komunikasi Publik, Aksi dan Advokasi

Fase ini berlangsung dari awal Desember 2024 hingga pertengahan Mei 2025, mencakup masa-masa intens dalam pengawalan kasus Een Jumianti. Pada tahap ini, BEM melakukan serangkaian strategi komunikasi publik yang mencakup:

a. Penerbitan pernyataan sikap terbuka di media sosial dan melalui kanal resmi.

Gambar 1 Pernyataan sikap



Sumber: Postingan instagram @suara.trunojoyo

b. Kampanye media sosial bertagar #KamiBersamaEen untuk membangun opini publik secara luas.

Gambar 2 Kampanye media sosial



Sumber: Postingan instagram @suara.trunojoyo

Gambar 3 Kampanye media sosial



Sumber: Postingan instagram @suara.trunojoyo

Gambar 4 Kampanye media sosial



Sumber: Postingan instagram @suara.trunojoyo

Gambar 5 Kampanye media sosial



Sumber: Postingan instagram @suara.trunojoyo

c. Penyelenggaraan aksi demonstrasi damai dan long march di lingkungan kampus dan luar kampus.

Gambar 6 Aksi demonstrasi damai



Sumber: Postingan instagram @suara.trunojoyo

Gambar 7 Aksi demonstrasi damai



Sumber: Postingan instagram @suara.trunojoyo





Sumber: Postingan instagram @suara.trunojoyo

d. Audiensi dengan pimpinan kampus, aparat kepolisian, hingga kejaksaan, yang disertai dengan penyerahan tuntutan tertulis.

Gambar 9 Audiensi dengan pimpinan kampus dan pihak kepolisian



Sumber: Postingan instagram @suara.trunojoyo

Gambar 10 Audiensi dengan Pengadilan Negeri Bangkalan



Sumber: Dokumentasi penelitian 2025

Strategi komunikasi yang digunakan menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya kecepatan, empati, dan konsistensi pesan. BEM menjaga kredibilitas komunikasi dengan menghindari provokasi dan tetap fokus pada narasi keadilan.

"Yang paling berat adalah intervensi dari pihak keluar karena di awal kasus ini udah banyak kejanggalan baik dari penanganan dari kepolisian, otopsi sampi penentuan pasal yng di gunakan oleh pihak kepolisian di awal. Dan memang ada

beberapa pihak yang mencoba ingin ikut campur dalam aksi ini karena aksi yang di buat teman-teman sudah masuk berita nasional."

(Wawancara dengan Korlap Aksi, 18 Juni 2025)

Meskipun mendapat tantangan, seperti keterbatasan akses informasi dari aparat dan potensi tekanan dari pihak luar, BEM mampu mempertahankan komunikasi yang stabil melalui koordinasi internal yang ketat dan komunikasi lintas departemen yang responsif.

3. Tahap Pasca-Krisis: Evaluasi dan Pembelajaran Organisasi

Setelah vonis hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku pada pertengahan Mei 2025 berdasarkan Pasal 340 KUHP, BEM KM UTM memasuki fase pasca-krisis. Organisasi melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian aksi melalui refleksi internal dan forum terbuka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

- a. Strategi komunikasi berhasil menjaga fokus gerakan selama lebih dari enam bulan.
- b. Dukungan publik meningkat secara signifikan, ditunjukkan oleh pelibatan mahasiswa lintas fakultas dan organisasi eksternal.

"Dampak ini sangat sustainable dan berkelanjutan, karena keadilan bagi seseorang yang bukan orang Madura dan yang kedua membuktikan bahwasanya hukum yang ada di bumi Madura masih tajam dan tidak tumpul kepada siapapun. Jadi kami tetap meningkatkan perihal ini agar kondusifitas di Bangkalan ini tetap terjaga."

(Wawancara dengan Presma UTM, 18 Juni 2025)

c. Peristiwa ini memperkuat legitimasi moral BEM di mata mahasiswa sebagai pelindung nilai-nilai keadilan.

"Permasalahan ini adalah permasalahan kemanusiaan, maka komitmen saya adalah ketika itu sudah berbicara mengenai kemanusiaan berarti kita wajib hukumnya memperjuangkan hak-hak kebenaran yang kita perjuangkan."

(Wawancara dengan Presma UTM, 18 Juni 2025)

Sebagai tindak lanjut, BEM menyusun naskah dokumentasi dan arsip digital sebagai bahan pembelajaran kelembagaan. Selain itu, muncul gagasan untuk menyusun pedoman advokasi hukum berbasis mahasiswa agar pengalaman ini dapat menjadi model dalam penanganan kasus serupa di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen komunikasi krisis yang dijalankan oleh BEM KM Universitas Trunojoyo Madura Kabinet Adbhinara dalam mengawal kasus Een Jumianti menunjukkan efektivitas dalam merespons situasi krisis sosial secara cepat, terstruktur, dan berbasis nilai keadilan. Melalui pendekatan komunikasi yang terbagi ke dalam tahap pra-krisis, saat krisis, dan pasca-krisis, organisasi mampu membentuk narasi publik yang kuat dan memperoleh kepercayaan serta dukungan dari civitas akademika dan masyarakat luas. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi organisasi mahasiswa tidak hanya bergantung pada kecepatan menyampaikan informasi, tetapi juga pada konsistensi pesan, koordinasi internal, dan kemampuan menjalin hubungan strategis dengan pihak eksternal. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar organisasi kemahasiswaan memiliki standar operasional tetap dalam manajemen krisis, serta pentingnya peran institusi kampus dalam memberikan ruang advokasi yang sehat dan dialogis. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup kasus yang spesifik pada satu organisasi dalam satu kampus, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan perbandingan antarorganisasi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi atau meneliti pengaruh komunikasi digital mahasiswa dalam membentuk opini publik terhadap proses hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Coombs, W. T. (2012). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing and Responding (3 ed.). SAGE Publications, Inc. https://books.google.co.id/books?id=r6K0pRwbNn0C&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Coombs, W. T. (2015). The value of communication during a crisis: Insights from strategic communication research. *Business Horizons*, 58(2), 141–148.
- Fithriyyah, M. U. (2021). *DASAR-DASAR TEORI ORGANISASI*. iRdev Riau: Institute for Research and Development.
- Karyanti, N., Suparman, Saleh, A., Pranata, R. H., Manisya, N., & Maharani, K. Z. (2024). KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MANAJEMEN KONFLIK DI

- BEM SEKOLAH VOKASI IPB UNIVERSITY. *Nivedana: Jurnal Komunikasi dan Bahasa*, 5(4), 548–561. https://doi.org/10.53565/nivedana.v5i4.1487
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Rosanti, L., & Satiningsih. (2022). Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Persepsi Dukungan Organisasi terhadap Komitmen Organisasi pada BEM Fakultas X di Masa Pandemi. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(7), 206–215.
- Zamzami, & Sahana, W. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2(1), 25–37.